

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat (AS) secara umum dianggap sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia pascaruntuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. AS muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang sangat kuat, sehingga hegemoni AS di dunia tidak dapat disangkal oleh negara-negara dunia. Kredibilitas AS didukung oleh peran pemerintah negaranya di setiap kebijakannya yang diatur secara ketat oleh pemerintah AS, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Politik luar negeri AS yang kuat menjadikan negara yang memiliki julukan Paman Sam tersebut disegani di dunia internasional. Kuatnya kebijakan luar negeri AS didukung oleh kekuatan nasional yang dimiliki AS. Sehingga, dapat dikatakan bahwa AS dikenal sebagai negara dengan komitmennya yang besar dalam memenuhi kepentingan nasional dan juga dalam membentuk tatanan geopolitik dunia (Wardhana & Dugis, 2019).

Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi perhatian dunia internasional, terutama terkait agenda pemilu nasional. Sebenarnya, agenda pemilu nasional suatu negara bukan merupakan peristiwa global, akan tetapi hal ini tidak berlaku pada pemilihan Presiden AS. Pemilihan presiden negara adidaya terkemuka di dunia ini akan berdampak pada tatanan geopolitik dunia, diantaranya seperti munculnya gejolak politik global yang mengakibatkan ketegangan hubungan antara AS dengan negara-negara di dunia, khususnya negara di Dunia Islam. Dalam pemilihan presiden, AS menganut sistem *electoral college* yang menerapkan *the winner takes all*. Sehingga, siapapun yang menang dalam *popular vote* belum tentu resmi terpilih sebagai presiden, dan yang berwenang menentukan kemenangan dalam pemilihan presiden adalah *electoral college* melalui jumlah *electoral vote* (Kline, 2020).

Laporan *Federal Election Commission of United States of America* pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Hillary Clinton memenangkan *popular vote* dengan total 65,853,514 juta suara dan mengalahkan Donald Trump yang mendapatkan total *popular vote* sebanyak 62,984,828 suara (Federal Election Commission, 2017). Namun demikian, Donald Trump memenangkan *electoral vote* dengan mendapatkan 306 suara dan mengalahkan Hillary Clinton yang hanya mendapatkan 232 suara. Sehingga dalam pemilihan Presiden tahun 2016, Kongres

Amerika mengesahkan Donald Trump sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden AS mengalahkan Hillary Clinton (NPR, 2016).

Pemilihan Presiden AS selalu menyita perhatian, terlebih ketika pemenang pemilihan Presiden AS pada tahun 2016 dimenangkan oleh figur yang kontroversial yaitu Donald Trump. Selama masa kampanye kepresidenan, Trump melontarkan berbagai pernyataan rasis dan seksis secara eksplisit, dari menyebut imigran Meksiko sebagai penjahat dan pemerkosa, menghina perempuan, hingga mempertanyakan bukti kewarganegaraan mantan Presiden AS, Barack Obama, dan menuduh Obama tidak dilahirkan di AS. Berbagai pernyataan Trump, baik pada masa kampanye kepresidenan maupun saat telah menjabat sebagai presiden, selalu berkaitan dengan ras dan agama. Bahkan, Trump telah dikenal sebagai sosok yang kontroversi sejak tahun 1970-an dan memiliki sejarah panjang kontroversi rasis hingga saat ini (Lopez, 2020; Yan, 2015).

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden tahun 2016 menggantikan posisi Barack Obama sebagai presiden sebelumnya menandai adanya perubahan corak politik luar negeri AS. Semula, pada masa kepemimpinan Barack Obama, politik luar negeri AS berfokus dalam isu-isu multilateralisme dan lebih mengedepankan *soft power* yang menekankan adanya kerja sama dan proses negosiasi dalam penyelesaian konflik. Selain itu, Obama bersikap lebih terbuka terhadap negara-negara Islam untuk mengembalikan kepercayaan Dunia Islam terhadap AS serta berkomitmen untuk memperbaiki keterlibatan AS dalam ketegangan konflik militer yang terjadi di kawasan Timur Tengah (Unger, 2016).

Berbeda dengan corak politik luar negeri Barack Obama, politik luar negeri pada masa kepemimpinan Donald Trump cenderung bersikap anti-hegemoni dan anti-multilateralisme. Latar belakang Donald Trump yang merupakan seorang pengusaha, menjadikan setiap kebijakan luar negerinya selalu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang dikenal dengan slogan "*Make America Great Again*". Sejalan dengan slogan tersebut, Presiden Donald Trump terus menetapkan berbagai kebijakan yang menimbulkan kontra di dunia internasional. Kebijakan politik Trump mengacu pada kebijakan proteksionisme atau yang dikenal dengan kebijakan *America First* yang berdampak dengan terjadinya kebijakan perang dagang antara AS dengan China, keputusan AS untuk meninggalkan *Trans Pacific Partnership* (TPP), serta kebijakan AS untuk keluar dari *Paris Agreement* (CFR, 2017; Charnovitz, 2018).

Corak politik luar negeri AS di masa Donald Trump terus mengalami perubahan, termasuk pandangan Trump terhadap Dunia Islam. Selama masa kampanye kepresidenan, Trump memainkan isu Islamophobia untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat AS. Hal ini didukung dengan adanya berbagai pernyataan Trump yang menyudutkan umat Islam, seperti gagasan Trump untuk pengawasan masjid-masjid di AS sebagai bagian dari penegakan hukum AS untuk mencegah terorisme serta pernyataan tentang pelarangan masuknya Muslim ke AS (Stephenson & Becker, 2016). Setelah resmi memenangkan pemilihan presiden AS, Trump merumuskan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap Dunia Islam seperti kebijakan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, kebijakan Muslim Ban termasuk pelarangan pemberian Visa untuk negara-negara mayoritas Muslim, serta kebijakan penarikan keanggotaan AS dalam kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).

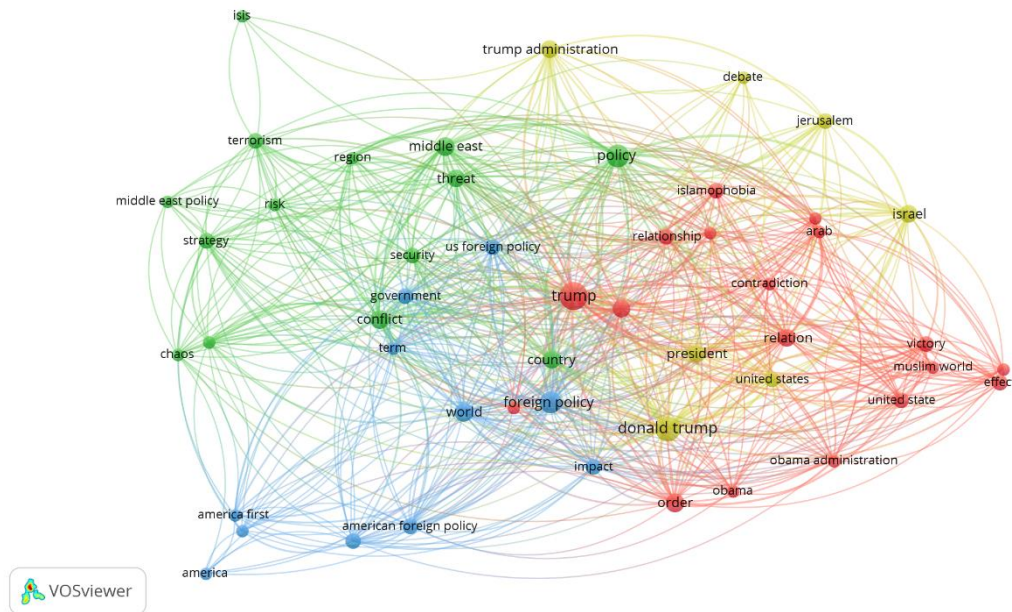
Kemenangan Donald trump sebagai Presiden AS pada tahun 2016 menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Dunia Islam. Kebijakan politik luar negeri AS yang tidak berpihak terhadap Dunia Islam bukan merupakan fenomena baru karena pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, kebijakan politik luar negeri AS juga mengalami ketegangan hubungan dengan Dunia Islam. Ketegangan hubungan AS dengan Dunia Islam sempat mereda pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, akan tetapi hubungan antar kedua pihak kembali mengalami ketegangan di era pemerintahan Presiden Donald Trump.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat era Presiden Donald Trump kurang bersahabat terhadap Dunia Islam?”

C. Kajian Pustaka

Gambar 1. 1 Peta Jejaring Antar Kata Kunci



Studi mengenai kebijakan politik AS pada masa kepemimpinan Donald Trump khususnya terhadap Dunia Islam telah banyak diteliti. Gambar 1 menunjukkan bahwa berdasarkan kata kunci, peta publikasi terkait kebijakan Trump terbagi dalam 4 kluster. Kluster pertama berwarna merah diantaranya Trump, *victory*, *islamophobia*, *muslim world* dan isu. Kluster kedua berwarna hijau yang terdiri dari beberapa kata kunci seperti *chaos*, ISIS, *terrorism*, *threat*, dan *strategy*. Kluster ketiga berwarna biru dengan kata kunci diantaranya seperti *Trump's foreign policy*, *foreign policy*, *America first*, *impact*, dan *world*. Kluster terakhir berwarna kuning yang memiliki kata kunci seperti Israel, Jerusalem, dan *debate*.

Beberapa studi yang membahas terkait kebijakan Donald Trump secara umum dan kebijakan terhadap Dunia Islam diantaranya studi (Schultz, 2019) yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri AS pada masa Presiden Trump mengalami perubahan yang telah menimbulkan pro dan kontra. Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan luar negeri negaranya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat AS serta keamanan AS di atas segalanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Presiden Trump telah mengadopsi pendekatan yang lebih nasionalis, isolasionistik, dan sepihak. Studi ini menyatakan bahwa kebijakan luar negeri di masa Presiden Trump bukan merupakan administrasi, melainkan pandangan pribadi Presiden Trump. Kebijakan AS dipersonalisasi dan bukan merupakan kesepakatan atau

musyawarah kelembagaan. Sehingga, kebijakan Presiden Trump yang merupakan pandangan pribadi bertabrakan dengan konstitusional, dan birokrasi.

Dalam studi (Brânda, 2018) disebutkan bahwa kebijakan luar negeri AS pada masa Donald Trump merupakan kebijakan yang kontroversial yang menyebabkan banyak keretakan, khususnya bagi hubungan AS dengan sekutu-sekutunya. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kerangka kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump. Dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, Presiden Obama cenderung melakukan pendekatan *soft-power diplomacy*. Sangat berbeda dengan Presiden Obama, Presiden Trump cenderung mengandalkan pengalamannya sebagai seorang pebisnis dalam menentukan kebijakan luar negerinya, yaitu tidak sesuai prosedur standar diplomatic atau norma presidensial. Studi ini menilai bahwa baik dalam masa pemerintahan Presiden Obama maupun Presiden Trump, kebijakan politik luar negeri AS belum signifikan dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perang yang telah disebabkan oleh kebijakan itu sendiri.

Di sisi lain studi (Sahide, 2018) membahas hubungan antara AS dengan Dunia Islam pada masa pemerintahan George W. Bush, Barack Obama dan pemerintahan Trump. Di era pemerintahan Bush, hubungan antara AS dengan Dunia Islam dipenuhi dengan kebencian yaitu meningkatnya fenomena Islamofobia di negara Amerika dan Eropa sedangkan di Dunia Islam sendiri kelompok radikal mulai bermunculan. Sehingga, kedua belah pihak, AS dan Dunia Islam, saling memiliki kecurigaan satu sama lain. Berbeda dengan Bush, pemerintahan Obama cenderung melakukan perbaikan hubungan dengan Dunia Islam berdasarkan kesetaraan kepentingan. Selama masa pemerintahannya, Obama berupaya untuk memberantas Islamofobia dan radikalisme. Akan tetapi, hingga akhir periode kepemimpinannya upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Selain itu, studi ini memprediksi hubungan antara AS dengan Dunia Islam pada masa pemerintahan Trump akan kembali memanas, seperti pada masa pemerintahan Bush. Prediksi terkait hubungan ini didasarkan pada janji kampanye Trump yang akan mengutamakan kepentingan serta keamanan AS.

Kebijakan Donald Trump terhadap Dunia Islam juga dikaji oleh studi (Ahmad et al., 2017) yang berfokus membahas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Problematika antara Israel dan Palestina dipicu oleh perebutan kekuasaan yang bermula ketika orang Yahudi atau masyarakat Israel menganggap kawasan Palestina merupakan tanah air mereka, begitupun sebaliknya. Studi ini menyebutkan bahwa Israel dan Palestina telah mengalami konflik sejak

tahun 1948 dan telah menimbulkan permusuhan antar kedua negara. Konflik tersebut semakin meluas dari tahun ke tahunnya, bahkan beberapa organisasi seperti Liga Arab dan OKI tidak memiliki rencana untuk upaya penyelesaian konflik kedua negara. Dalam upaya penyelesaian konflik kedua negara, AS memerankan peranan yang penting karena Amerika ditunjuk sebagai mediator upaya perdamaian antar kedua pihak. AS dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, dalam upaya penyelesaian konflik cenderung berpihak ke Israel dan merugikan pihak Palestina.

Kebijakan Donald Trump yang cenderung pro-Israel juga dibahas dalam studi (Abdiel, 2020). Hal pertama yang dilakukan administrasi Trump adalah merelokasi Kedutaan Besar Amerika ke Jerusalem yang kemudian diikuti dengan 14 kebijakan luar negeri AS yang lainnya yang menunjukkan keberpihakkannya terhadap Israel. Studi ini juga mengungkapkan bahwa untuk mendukung kepentingan pro-Israel, pemerintahan Trump diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Di awal masa kepemimpinannya, Trump menetapkan David Friedman sebagai Duta Besar AS untuk Israel dan Nikki Haley sebagai Duta Besar AS untuk PBB. Penetapan kedua pejabat tersebut dikenal atas dukungan mereka terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan pembatasan Gaza. Studi ini menyatakan bahwa kebijakan pro-Israel dalam administrasi Trump dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Trump yang dominan. Keterlibatan Trump dalam politik luar negeri semata-mata hanya karena kegembiraannya, sehingga pandangan pribadi Trump sangat kuat dalam kebijakan tersebut.

Kebijakan Trump yang kontroversi terkait Dunia Islam akan mengantarkan AS pada krisis legitimasi politik yang akan kehilangan supremasi politiknya di kancah politik global kontemporer (Sahide, 2019). Pernyataan Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai pro-kontra di dunia internasional, karena Jerusalem melalui resolusi PBB 181 tahun 1947 ditetapkan sebagai kota di bawah wewenang internasional. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) sepakat untuk tidak ikut dengan Trump mengenai Jerusalem. Selain itu, negara anggota Uni Eropa juga mengecam tindakan Trump. Secara umum, pernyataan Trump dianggap oleh pemimpin politik dunia sebagai hal yang mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Beberapa tokoh seperti Angela Merker dan Kanselir German berfikir untuk tidak bergantung dengan AS, begitupula OKI yang juga berfikir untuk mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap AS.

Lebih lanjut, studi (Rosenfeld, 2019) menunjukkan bahwa Hitler memainkan peranan penting dalam membantu memahami Trump. Munculnya gerakan politik sayap kanan di Barat

telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat Eropa dan Amerika Utara. Dua kelompok pengamat khawatir bahwa Nazi telah muncul kembali di masa sekarang. Kemenangan politik Trump memiliki kemiripan yang mengkhawatirkan seperti Adolf Hitler. Studi ini menyebutkan bahwa terdapat banyak kesamaan ciri kepribadian Trump dan Hitler, yang sama-sama “narsisis egomaniak”. Baik Trump maupun Hitler memiliki kecenderungan untuk mencampur kebohongan dengan kebenaran. Kesamaan lain bahwa pendukung Trump memiliki kesamaan dengan pendukung Hitler, yaitu orang-orang yang mudah marah dan frustrasi yang merasa terancam oleh dunia yang telah berubah dengan cara yang tidak mereka pahami. Hitler dan kepemimpinan Nazi tidak religius dan mengumpulkan pengikut mereka dengan kebencian terhadap orang Yahudi dan Katolik, sedangkan Trump mengumpulkan pendukung yang memiliki kebencian terhadap Islam.

Hitler memiliki Asperker, dengan keterampilan sosial yang buruk, obsesi tunggal dengan teori konspirasi, dan tidak toleran terhadap siapapun yang tidak setuju dengannya. Hal ini selaras dengan Trump yang memiliki narsisme, dengan keterampilan sosial yang aneh, kepercayaan pada teori konspirasi, dan intoleransi terhadap orang-orang yang tidak setuju dengannya. Kebutuhannya yang terdalam adalah kekaguman dan dukungan dari rasa dirinya yang sangat penting. Pada akhirnya kepribadian dua pemimpin ini mendorong seluruh negara untuk berhati-hati terkait kemunculan sosok lain seperti Hitler maupun Trump di masa yang akan datang dengan memperkuat sistem demokrasi negara, sehingga dapat meminimalisir dampak konflik yang akan terjadi.

Studi (Sujito et al., 2019) menyebutkan bahwa Trump menerapkan manipulasi ideologis untuk memenangkan pemilihan Presiden AS. Studi ini menemukan tiga ideologi Trump, yaitu ideologi untuk menghancurkan tindakan terorisme, menang atas Obama dan Clinton dan memenangkan pemilihan Presiden AS tahun 2016. Pemilihan kata dalam pidato kampanye presidennya terkait militan Jihad menunjukkan bahwa Trump menganggap Jihad sebagai ancaman dengan menggunakan beberapa frasa seperti “penembakan massal terburuk” dan “serangan terburuk”. Trump menciptakan gagasan bahwa perilaku Jihad merupakan ancaman bagi keselamatan AS dan para pelaku Jihad harus dihancurkan. Trump menggunakan strategi ini untuk mendapatkan banyak dukungan dari warga AS. Strategi ideologi umum yang digunakan oleh Trump adalah merepresentasikan diri yang positif, salah satunya dengan cara menjelek-jelekkan Obama dan Clinton. Menurut Trump, banyaknya para pelaku Jihad dikarenakan “tour permintaan maaf Obama” dan juga kegagalan dari perjanjian Irak Clinton. Trump menang atas Obama dan Clinton dengan menempatkan mereka sebagai pendiri ISIS.

Hal tersebut yang kemudian dijadikan Trump sebagai strategi kemenangannya dalam pemilihan Presiden AS tahun 2016.

Studi (Immelman & Griebie, 2020) mengungkapkan perspektif ahli personologi, Theodore Millon, terhadap kepribadian Trump berdasarkan dinamika kepribadian yang terungkap dari perilaku politiknya selama menjabat sebagai Presiden AS. Studi ini menemukan bahwa pola kepribadian utama Trump adalah ambisius, dominan, ramah, dan pemberani. Kepribadian Trump yang ambisius dapat terlihat dari perilakunya yang berani, kompetitif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan sering berperilaku seolah-olah ia merupakan sosok yang paling berkuasa. Sedangkan sisi dominan Trump tergambar dari kekuatan Trump untuk mengarahkan orang lain untuk taat dan patuh terhadap Trump. Studi ini menilai Trump sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul karena perilaku Trump yang selalu ingin terlihat aktif di berbagai acara sosial, berusaha keras untuk menjadi populer dan dikenal banyak orang. Sifat pemberani Trump didasarkan atas perilaku Trump yang sering mencemooh tradisi, tidak suka mengikuti aturan, bertindak impulsif dan tidak mau bertanggungjawab, serta perilaku Trump yang cenderung menutupi kebenaran dan melanggar hukum.

Studi (Siniver & Featherstone, 2020) mengkaji kebijakan politik luar negeri Trump sebagai produk dari gaya kepemimpinan yang mengakar dalam pandangan dunia yang plutokratis. Trump merupakan presiden dengan kompleksitas konseptual yang rendah karena pencarian informasi dan saran yang terbatas, pendekatan konfrontatif dan tidak peka terhadap lingkungannya, serta kecenderungan Trump untuk melanggar norma dan aturan internasional. Studi ini menunjukkan bahwa kompleksitas konseptual Trump yang rendah didukung oleh pandangan Trump mengenai dunia yang plutokratis, yang mengutamakan transaksi dan uang. Pandangan dunia ini yang kemudian menjadi salah satu faktor perbedaan corak kebijakan politik luar negeri Trump yang berbeda dengan para presiden pendahulunya.

Terlihat dengan jelas dalam gambar 1 bahwa kata kunci "*muslim world*" terletak di pinggir, yang artinya kata kunci tersebut masih belum banyak dibahas dalam penelitian. Maka dari itu, artikel ini akan menganalisa kebijakan politik luar negeri AS khususnya terhadap Dunia Islam era Presiden Donald Trump. Artikel ini akan lebih memiliki novelty dari berbagai studi sebelumnya dalam bentuk analisa faktor psikologi Trump dibalik perumusan kebijakan politik luar negeri AS dan juga pemaparan berbagai kebijakan serta dampak politik luar negeri AS terhadap Dunia Islam.

D. Kerangka Berpikir

Kebijakan suatu negara dapat dijelaskan melalui sejumlah teori yang dibangun dengan metodologi yang berbeda-beda. Untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri AS khususnya terhadap Dunia Islam, di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, penulis menggunakan teori *foreign policy decision making process* dengan pendekatan psikologi. Secara konsep, kebijakan politik luar negeri sering dipahami sebagai tindakan otoritatif yang ditetapkan atau dilakukan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasional dan domestiknya. Tindakan otoritatif yang ditetapkan suatu negara telah melalui berbagai pertimbangan dan orientasi tujuan yang jelas, yaitu untuk memecahkan konflik maupun mempromosikan beberapa perubahan dalam lingkungan internasional. Sederhananya, kebijakan politik luar negeri terdiri dari pernyataan dan tindakan yang diambil oleh subjek negara dalam hubungannya dengan aktor eksternal lain yang dapat berupa negara maupun aktor non-negara.

Politik luar negeri merupakan engsel antara politik domestik dan internasional. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal yang berupa kondisi domestik suatu negara dan faktor eksternal. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, faktor eksternal memainkan peran yang lebih utama dibandingkan dengan faktor internal (AS, 2018). Mengingat politik luar negeri merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap entitas di luar batas negara serta kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, maka adanya perubahan dalam kebijakan politik luar negeri merupakan hal yang sudah sering terjadi. Dengan kata lain, politik luar negeri bukanlah sesuatu yang statis, tapi cenderung berubah untuk mencapai tujuannya (Dugis, 2008).

Adanya perubahan politik luar negeri suatu negara, selain dipengaruhi karena adanya faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat berupa konteks internasional dan juga kondisi individu pemimpin itu sendiri. Premis dari pendekatan psikologis pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri mengasumsikan bahwa para pemimpin negara atau individu merupakan aktor yang penting dalam penentuan keputusan kebijakan luar negeri yang bertindak berdasarkan definisi individu tersebut tentang situasi dalam domain politik dunia. Pendekatan psikologis seorang individu dianggap sebagai level analisa yang paling mendasar namun sangat fundamental, karena bagaimana sistem internasional, negara dan masyarakat terbentuk tidak dapat terlepas dari level individu yang menyusunnya. Margaret Hermann, yang merupakan psikolog politik, mencatat bahwa kepentingan pemimpin juga

meningkatkan kemungkinan adanya pengambilan keputusan tingkat individu (C. F. Hermann, 1990).

Alex Mintz dan Karl DeRouen dalam bukunya yang berjudul *Understanding Foreign Policy Decision Making* menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara yang mengakibatkan adanya proses proses pengambilan keputusan yang mengarah pada perubahan terkait program, tujuan, dan orientasi internasional. Faktor pertama merupakan *leader's personality* atau kepribadian pemimpin. David Winter mendefinisikan kepribadian sebagai suatu proses integrasi berpola individual dari proses persepsi, memori, penilaian, pencarian tujuan dan ekspresi serta regulasi emosional. Menurut Winter, kepribadian dibagi menjadi empat elemen: (1) temperamen yang mengacu pada komponen perilaku yang dapat diamati seperti tingkat energi, (2) kongnisi yang mencakup beberapa faktor seperti kepercayaan, nilai, sikap, serta motif dan tujuan dan mekanisme pertahanan, (3) motif, dan (4) konteks sosial yang melibatkan jenis kelamin, kelas, ras, budaya dan etnis (Winter, 2003).

Faktor kedua adalah *leadership style* atau gaya kepemimpinan individu. Salah satu cara untuk memahami proses pengambilan keputusan kebijakan dapat ditetapkan oleh pemimpin yaitu dengan menganalisa gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Alex dan Karl membagi menjadi 2 gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin yang didorong oleh tujuan dan pemimpin yang didorong oleh konteks. Pemimpin yang didorong oleh tujuan memfokuskan diri untuk memecahkan suatu masalah atau dengan kata lain pemimpin yang berorientasi pada tugas. Pemimpin yang berorientasi pada tugas cenderung tidak membutuhkan koalisi baik dari internasional maupun domestik sebelum mengambil kebijakan dan mempertahankan kebijakan. Sedangkan, pemimpin yang berorientasi pada konteks cenderung mudah beradaptasi dengan situasi saat ini. Para pemimpin tipe ini terbuka untuk saling berdiskusi dalam rangka menemukan solusi yang fleksibel untuk berbagai masalah. Pemimpin ini dapat menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan situasi tertentu dan bekerja untuk membangun koalisi di tingkat internasional.

Perbedaan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan dan yang didorong oleh konteks adalah tingkat kepekaan terhadap konteks politik. Pemimpin yang berorientasi pada tugas tidak terlalu peka terhadap konteks politik, sedangkan pemimpin yang didorong oleh konteks sangat peka. Hal tersebut yang kemudian memiliki relevansi yang besar dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pemimpin yang berfokus pada tujuan dalam

cenderung tidak berkonsultasi dan berkompromi karena kecenderungan mereka untuk menantang batasan politik. Selain itu, tipe pemimpin ini kurang terbuka terhadap informasi baru. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada konteks karena memiliki kepekaan terhadap politik, maka cenderung untuk tidak membawa negara mereka dalam konflik yang sedang terjadi di dunia internasional. Selain itu, pemimpin tipe ini secara aktif mencari informasi baru. Sehingga, para pemimpin yang berorientasi pada konteks akan bekerja dalam batasan-batasan yang memerlukan pembentukan koalisi, empati, kepekaan terhadap konstituen dan kompromi (Mintz & DeRouen, 2010).

Melalui kedua gaya kepemimpinan tersebut. studi (M. G. Hermann et al., 2001) membagi tipologi gaya kepemimpinan menjadi empat kategori. Pertama, *crusader* yaitu pemimpin yang menantang batasan politik tapi cenderung tertutup terhadap berbagai informasi baru. Tipe pemimpin *crusader* terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu *expansionis* yaitu seorang pemimpin menginginkan lebih banyak wilayah dan kekuasaan berdasarkan tingkat nasionalismenya yang tinggi, kepercayaan diri, dan motivasi kekuasaan. Para pemimpin *crusader* dengan tipe *expansionis* cenderung ingin memiliki kontrol yang besar, memiliki kemampuan yang rendah terhadap berbagai alternatif pembuatan keputusan, dan cenderung untuk tidak mementingkan hubungan pertemanan. Tipe kedua pemimpin *crusader* adalah *evangelis* yang lebih nyaman dengan hubungan dan mempengaruhi orang lain menuju tujuan yang sama dengan mereka. Tipe kedua adalah pemimpin yang *strategis*, dimana pemimpin mengetahui apa yang diinginkan dan akan mencari informasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ketiga, pemimpin *pragmatis* yang menghormati batasan-batasan politik tetapi tertutup untuk menerima informasi-informasi baru. Tipe kepemimpinan terakhir adalah pemimpin yang *oportunistik* yaitu pemimpin yang menghormati batasan dan terbuka untuk menerima berbagai informasi baru.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri dalam level individu adalah *leadership psychology*. Psikologi kepemimpinan mengacu pada berbagai elemen psikologis seperti nilai, bakat dan pengalaman sebelumnya serta asumsi yang dibawa oleh setiap pemimpin ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri (Mintz & DeRouen, 2010). Melalui teori *foreign policy decision making process* menggunakan pendekatan psikologi, dengan menganalisa kepribadian pemimpin dapat membantu memahami mengapa beberapa pemimpin menentukan kebijakan tertentu, sedangkan pemimpin lain yang menghadapi situasi serupa menentukan kebijakan yang sangat berbeda. Melalui pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Donald Trump yang berorientasi pada

tujuan dan termasuk tipe pemimpin yang *crusader expansionist* sangat mempengaruhi perumusan kebijakan politik luar negeri AS khususnya terhadap Dunia Islam.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang serta kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis, maka perumusan kebijakan politik luar negeri AS yang kurang bersahabat terhadap Dunia Islam dipengaruhi oleh faktor tipe pemimpin Donald Trump yang *crusader expansionist* dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan. Berdasarkan tipe dan gaya kepemimpinan tersebut, Donald Trump merumuskan kebijakan yang cenderung tidak mementingkan hubungan pertemanan dan menimbulkan ketegangan hubungan khususnya bagi Dunia Islam.

F. Metode Penelitian

Tulisan ini menempatkan negara-bangsa sebagai subjek penelitian dan menganalisa faktor psikologis Donald Trump yang merupakan bagian dari negara-bangsa. Tulisan ini didasarkan pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisa studi kasus mengenai kebijakan luar negeri AS khususnya terhadap Dunia Islam di era Donald Trump. Penulis memfokuskan artikel pada studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Artikel ini menggunakan pendekatan analisa data sekunder yang mencakup buku, artikel, surat kabar, serta sumber lain yang mencakup permasalahan pokok penelitian. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisa menggunakan aplikasi VosViewer untuk memvisualisasikan data yang telah didapatkan. Data visual yang diperoleh dari VosViewer kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan akan dibagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian pertama merupakan Bab I yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, kajian Pustaka, kerangka berfikir, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian
2. Pembahasan berikutnya di Bab II akan membahas mengenai sejarah hubungan AS dengan Dunia Islam dari Presiden George W. Bush hingga Presiden Donald Trump
3. Pada Bab III akan membahas tentang kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam bab III, penulis akan menguraikan

berbagai kebijakan politik luar negeri AS bagi Dunia Islam yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Presiden Donald Trump diantaranya seperti kebijakan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, kebijakan Muslim Ban termasuk pelarangan pemberian Visa untuk negara-negara mayoritas Muslim, Langkah penarikan keanggotaan AS dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), serta AS dibalik normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab

4. Dalam Bab IV, penulis menganalisa ketidakberpihakkan perumusan kebijakan politik luar negeri AS terhadap Dunia Islam era Presiden Donald Trump dengan pendekatan psikologis dari *Foreign Policy Decision Making Process Theory*. Di bab IV juga akan dipaparkan dampak eksternal kebijakan politik luar negeri AS bagi Dunia Islam
5. Di Bab terakhir atau Bab IV berisi kesimpulan dari keseluruhan materi yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.